

**RENCANA
KERJA
DINKES
GOWA
TAHUN 2017**

DAFTAR ISI

	Halama n
HALAMAN JUDUL	I
DAFTAR ISI	II
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan hukum	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penyusunan	
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	
2.2 Analisis kinerja Pelayanan SKPD	
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas danPD	
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	
3.3 Program dan Kegiatan	
BAB IV : PENUTUP	
4.1 Kesimpulan	
4.2 Hambatan dan Kendala	
4.3 Rencana Tindak Lanjut	

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan ditetapkannya UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2017 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama – sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun dan untuk menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang Kesehatan tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar di rencanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga

menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas dengan mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI) tentang Tahapan Dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang Kesehatan dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2017.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 18 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2003-2013; (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 24 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2005 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 8);

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dimaksudkan untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Dinas Kesehatan, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan dengan menitikberatkan pada program – program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Permendagri no 54 Tahun 2010 tentang cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2017 disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

- 1.1. Latar Belakang Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.
- 1.3. Maksud dan Tujuan Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.
- 1.4. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi

SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
- 3.3 Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:
 - a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. - Pencapaian visi dan misi kepala daerah, - Pencapaian MDGs, - Pengentasan kemiskinan, - Pencapaian SPM, - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, - Pengembangan daerah terisolir,
 - b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: - Jumlah program dan jumlah kegiatan. - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB. II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan. Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2017 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2016 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2017;
 - b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- Berikut tabel

1. mengenai pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan, sejauh mana target kinerja dan capaian tahun yang lalu sampai dengan tahun berjalan serta rencana target kinerja capaian program (Renstra SKPD) ditahun 2017.

PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2017

NO	KEGIATAN OPD	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SATUAN	TARGE
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Dinas Kesehatan)	persentase ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	%	100
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Dinas Kesehatan)	jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	%	100
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional (Dinas Kesehatan)	persentase kelancaran pelayanan administrasi kantor	%	100
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan (Dinas Kesehatan)	jumlah bahan bacaan dan peraturan perUUan yang tersedia	buah	
5	Rapat - Rapat Kordinasi dan konsultasi Dalam dan Luar daerah (Dinas Kesehatan)	persentase lancarnya koordinasi dalam dan luar daerah	%	100
6	Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor (Dinas Kesehatan)	persentase tersedianya jasa administrasi kantor	%	100
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung Kantor (Dinas Kesehatan)	persentase terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	%	100
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	persentase terselenggaranya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	%	100
9	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	persentase terselenggaranya pakaian khusus hari2 tertentu	%	100
10	Pendidikan dan Pelatihan Formal	persentase penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan formal	%	100
11	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	persentase puskesmas yang terlatih	%	100

12	Penyusunan Profil Kesehatan (Dinas Kesehatan)	jumlah dokumen profil kesehatan yang tersedia	dokumen	20
13	Penyusunan Dokumen-dokumen Perencanaan dan Penganggaran	jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan	dokumen	20
14	Pengadaan Obat Generik (DAK)	persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan jaringannya	%	100
15	Peningkatan Kemampuan Teknis Manajemen Puskesmas	persentase puskesmas yang terlatih kemampuan teknis manajemen	%	100
16	Pelayanan Kesehatan Hari Besar Keagamaan	persentase ketersediaan pelayanan kesehatan	%	100
17	Pelayanan Kesehatan Bagi Hari Besar Nasional	persentase ketersediaan pelayanan kesehatan	%	100
18	Bimbingan Teknis Sarana Distribusi Pangan dan Toko	jumlah sarana distribusi pangan/toko yang terlatih	buah	16
19	Pertemuan Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi	persentase pemahaman standar dan instrumen akreditasi	%	100
20	Tes Kebugaran bagi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	persentase kesehatan pegawai Dinas Kesehatan	%	100
21	Tes Kebugaran bagi Calon Jamaah Haji	persentase kesehatan calon jamaah haji	%	100
22	Bimbingan Teknis Kesehatan Jiwa	jumlah puskesmas yang terlatih kesehatan jiwa	puskesmas	25
23	Asuhan Mandiri Ramuan	persentase peningkatan pengetahuan dan keterampilan puskesmas	%	100
24	Pembinaan Tanaman Obat Keluarga	persentase puskesmas yang menyelenggarakan TOGA	%	100
25	Bimbingan Teknis Kesehatan Tradisional	persentase puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan tradisional	%	100

26	Pertemuan Triwulan Petugas Kesehatan Olahraga	persentase terselenggaranya pertemuan petugas	%	100
27	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	persentase hasil pemeriksaan kesehatan calon haji tahun berjalan	%	100
28	Pemilihan tenaga kesehatan teladan dan penilaian puskesmas berprestasi	jumlah tenaga kesehatan teladan dan puskesmas berprestasi	puskesmas	25
29	Sosialisasi Pengelola/Pemilik Apotik	persentase peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan apotik	%	100
30	Bimbingan Teknis Klinik Swasta	jumlah pengelola klinik swasta yang terlatih	klinik	20
31	Program Pelayanan Kesehatan Gratis	jumlah puskesmas yang mendapatkan anggaran Pelayanan Kesehatan Gratis	puskesmas	25
32	Biaya Operasional Kesehatan (BOK) puskesmas	jumlah puskesmas yang mendapatkan BOK	buah	25
33	Pelatihan Kader Posbindu	jumlah kader posbindu yang terlatih		
34	Pembuatan Radio Spot	jumlah radio spot yang tersedia	buah	35
35	Monev Pelaksanaan Keluarga Sehat	persentase puskesmas menyelenggarakan program keluarga sehat	%	100
36	Pelatihan Pengembangan Kegiatan Saka Bakti Husada (SBH)	persentase peningkatan Saka Bakti Husada (SBH) bagi Puskesmas	%	100
37	SMS Gateway	jumlah puskesmas yang menerapkan sms Gateway	puskesmas	25
38	Penyuluhan Dampak Rokok terhadap Kesehatan Bagi Anak Remaja	persentase puskesmas menyelenggarakan penyuluhan	%	100
39	Pemberian Makanan dan Vitamin	persentase terlaksananya pemberian makanan	%	100

		dan vitamin bagi penderita gizi buruk		
40	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	persentase kelancaran pelaksanaan kegiatan di Puskesmas	%	100
41	Sosialisasi pentingnya 1000 Hari pertama kehidupan Lintas Sektor dan Lintas Program	persentase PKK dan kader mengetahui 1000 hari pertama kehidupan	%	100
42	Bimbingan Teknis Gizi	persentase TPG mengetahui program gizi	%	100
43	Orientasi Implementasi IMD dan ASI Eksklusif bagi Petugas Gizi dan Promkes	persentase petugas gizi mengetahui IMD dan ASI eksklusif	%	100
44	Pelatihan Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Tempat-tempat Umum (TTU) dan Tempat Pengolahan	persentase sanitarian dan petugas kesling puskesmas mengetahui pengelolaan TTU	%	100
45	Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat	persentase tim kecamatan mengetahui lingkungan sehat	%	100
46	Pelaksanaan Verifikasi Program Kabupaten Sehat	persentase puskesmas yang terverifikasi melaksanakan kabupaten sehat	%	100
47	Pengawasan Kualitas Air Minum	persentase terselenggaranya pengawasan air minum	%	100
48	Sosialisasi Peraturan Pemerintah	persentase petugas mengetahui peraturan Pemerintah	%	100
49	Verifikasi Desa dan Kecamatan ODF (Open Defecation Free) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	persentase desa dan kecamatan yang menerapkan ODF atau SBS	desa	167
50	Penyemprotan/fogging sarang nyamuk (Dinas Kesehatan)	persentase terlaksananya fogging	%	100
51	Pengadaan Alat Fogging dan Bahan Fogging	tersedianya obat fogging	liter	200

		tersedianya abate	kegiatan	1
52	Penyegaran Imunisasi bagi Bidan Desa	persentase bidan menyelenggarakan imunisasi bagi anak	%	100
53	Bimbingan Teknis Program Imunisasi	persentase petugas terampil melaksanakan imunisasi bagi anak	%	100
54	Pengamatan dan Penanggulangan Penyakit Berpotensi KLB/Wabah	persentase petugas menyelenggarakan pemagamatan dan penanggulangan penyakit berpotensi KLB	%	100
55	Pengadaan Logistik	jumlah logistik yang tersedia		
56	Bimbingan Teknis Program P2	persentase petugas terampil melaksanakan program P2	%	100
57	Pertemuan Petugas Pengelola PTM Khusus Obesitas, Hipertensi dan Rokok	persentase petugas mengetahui dan terampil melaksanakan pengendalian obesitas, hipertensi dan rokok	%	100
58	Workshop Tatalaksana Kasus Gigitan Anjing	persentase petugas mengetahui tatalaksana kasus gigitan anjing	%	100
59	Bimbingan Teknis Surveillance	persentase petugas terampil melaksanakan surveillance	%	100
60	Monev dan Pelaporan Program Posbindu	persentase kelancaran pelaporan posbindu	%	100
61	Pertemuan petugas terlatih Kanker Leher Rahim	persentase petugas terampil dalam penanganan Kanker Leher Rahim	%	100
62	Pemantauan jentik Daerah Endemis DBD	persentase Puskesmas melaksanakan penanggulangan DBD	%	100
63	Pertemuan Peningkatan Kapasitas Petugas Program Diare Puskesmas	persentase petugas mengetahui penanggulangan Diare	%	100

64	Workshop Tatalaksana Kasus ISPA dan Software ISPA	persentase petugas mengetahui dan terampil dalam penatalaksanaan kasus ISPA dan Software ISPA	%	100
65	Sosialisasi Program Hepatitis untuk Petugas puskesmas	persentase petugas mengetahui penatalaksanaan penyakit Hepatitis	%	100
66	Pertemuan evaluasi Pemberian Obat Cacing	persentase petugas terampil dalam pemberian obat cacing selama 5 tahun	%	100
67	Sosialisasi program Rabies	persentase petugas mengetahui penatalaksanaan penyakit Rabies	%	100
68	Bimbingan Tekhnis program Penyakit Menular Bersumber Binatang	persentase petugas mengetahui penyakit menular bersumber binatang	%	100
69	Pelatihan Petugas UBM dan KTR	persentase petugas mengetahui program UBM dan KTR	%	100
70	Monev program Surveillance	persentase kelancaran pelaporan pelaksanaan surveillance	%	100
71	pertemuan Monev program Surveillance	persentase petugas terampil dalam melaksanakan pelaporan program surveilans	%	100
72	Pertemuan Sosialisasi Kegiatan IVA	persentase petugas mengetahui tatalaksana pemeriksaan IVA	%	100
73	Pertemuan Petugas Pengelola PTM khusus Jemaah haji	persentase petugas terampil dalam penatalaksanaan PTM bagi jamaah Haji	%	100
74	Workshop Tatalaksana TB Anak	persentase petugas mengetahui dan terampil dalam penatalaksanaan penyakit TB	%	100

75	Bimtek P2 TB	persentase petugas mengetahui dan terampil dalam penatalaksanaan penanggulangan penyakit TB	%	100
76	Sosialisasi dan pembentukan Pos TB Desa	persentase terbentuknya pos TB desa	desa	30
77	Monev Pos TB Desa Program P2 TB	persentase kelancaran kegiatan Pos TB desa	%	100
78	Pengadaan bahan Laboratorium Program P2 TB	persentase tersedianya bahan laboratorium program P2 TB	%	100
79	Pertemuan Jejaring Eksternal program P2 TB	persentase petugas melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor mengenai penanggulangan TB	%	100
80	Bimtek program P2 Kusta	persentase petugas memahami penatalaksanaan program p2 kusta	%	100
81	Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin (Dinas Kesehatan)	persentase masyarakat miskin yang mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan	%	100
82	Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas	tersedianya sarana dan prasarana di puskesmas (incenerator)	unit	1
83	Rehabilitasi Pustu	tersedianya gedung baru pustu	unit	12
84	Rehabilitasi Rumah Medis	terlaksananya gedung baru rumah medis	unit	7
85	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	persentase kelancaran pelaporan kegiatan	%	100
86	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan	persentase kelancaran pelaporan kegiatan	%	100

87	Monitoring dan evaluasi program Kesehatan Ibu, Anak dan KB	persentase kelancaran pelaksanaan program kesehatan Ibu, Anak dan KB di Puskesmas	%	100
88	Audit Maternal Perinatal (AMP)	persentase petugas memahami dan terampil dalam penatalaksanaan AMP	%	100
89	Pertemuan Analisa Cakupan Program Kesehatan keluarga Tk.Kabupaten	persentase petugas memahami dan terampil dalam penatalaksanaan kesehatan keluarga	%	100
90	Orientasi P4K (Program persalinan dan pencegahan Komplikasi)	persentase petugas memahami dan terampil dalam orientasi P4K	%	100
91	Refresing Penggunaan Buku KIA	persentase petugas mengetahui penggunaan buku KIA	%	100
92	Pertemuan Koordinasi LP/LS dalam upaya Penurunan AKI/AKB	persentase lintas program dan lintas sektor saling mengkoordinasikan kegiatannya	%	100
93	Pelayanan Jaminan persalinan	jumlah puskesmas yang mendapatkan Jampersal	puskesmas	25
94	Pertemuan Perencanaan Tahunan Puskesmas	jumlah dokumen perencanaan tahunan Puskesmas	dokumen	25
95	Pendampingan Operasional JKN	persentase kelancaran pelaksanaan program JKN	%	100
96	Pendampingan LSM	persentase terlaksananya program pendampingan oleh LSM	%	100
97	Pembangunan Puskesmas (DAK)	jumlah puskesmas yang dibangun dengan penganggaran DAK	%	100
98	Pengadaan ambulance (DAK)	jumlah ambulance dengan penganggaran DAK	%	100
99	Pengadaan Kendaraan Operasional (DAK)	jumlah kendaraan operasional dengan penganggaran DAK	%	100

100	Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) (DAK)	jumlah Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL) dengan penganggaran DAK	%	100
101	Pengadaan Perangkat Komputer (SIKDA/SIKNAS) (DAK)	jumlah perangkat komputer yang tersedia dengan penganggaran DAK	%	100
102	Pengadaan Alat Kesehatan bagi Puskesmas (DAK)	jumlah alat kesehatan yang tersedia di Puskesmas dengan penganggaran DAK	%	100
103	Biaya Operasional (DAK)	persentase terlaksananya program DAK	%	100

PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2017

NO	PROGRAM OPD	SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	TARGE
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi dan pengaturan kegiatan kantor dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan	Persentase terselenggaranya administrasi dan pengaturan kegiatan kantor dengan lancar dan baik sesuai dengan aturan	%	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan kantor	Persentase terselenggaranya peningkatan sarana dan prasarana	%	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dalam rangka peningkatan kinerja aparatur	persentase terselenggaranya kedisiplinan aparatur dalam bekerja	%	100
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	meningkatkan kualitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan dalam tata kelola pemerintahan yang baik	persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan	%	100

5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat	persentase penyelenggaraan program upaya kesehatan masyarakat	%	100
6	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	meningkatnya pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat	persentase penyelenggaraan promosi dan pemberdayaan masyarakat	%	100
7	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	meningkatnya pelayanan gizi masyarakat	persentase penyelenggaraan perbaikan gizi masyarakat	%	100
8	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	meningkatnya penyehatan dan kualitas lingkungan	persentase terselenggaranya program pengembangan lingkungan sehat	%	100
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	menurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular dan peningkatan kualitas lingkungan	persentase terselenggaranya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	%	100
10	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	persentase terselenggaranya upaya kesehatan masyarakat miskin	%	100
11	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	meningkatnya kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat	persentase terselenggaranya pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya	%	100
12	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan bagi Lansia	persentase terselenggaranya kemitraan pelayanan kesehatan masyarakat	%	100
13	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bagi ibu bersalin dan anak	persentase terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi lansia	%	100

14	Program Perencanaan Sistem Perencanaan	meningkatnya pelaksanaan perencanaan dalam rangka pelayanan kesehatan yang optimal	persentase terselenggaranya peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	%	100
15	Program DAK Bidang Kesehatan	meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan ketersediaan sarana dan prasarana di Puskesmas dan jaringannya dengan dukungan sumber DAK	persentase terselenggaranya perencanaan sistem perencanaan	%	100
16	Program Pendamping Kegiatan	meningkatnya pelaksanaan kegiatan dengan sumber DAK	persentase terselenggaranya program pembangunan bidang kesehatan dengan dukungan DAK	%	100

II. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kab. Gowa

Indikator kinerja pelayanan dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2., yaitu :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100
		cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100

		Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif	%	100
		Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	%	100
2	Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Cakupan pelayanan kesehatan penderita hipertensi	%	100
		Cakupan pelayanan kesehatan penderita DM	%	100
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	%	100
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan TB	%	100
		Cakupan pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	100
3	meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas terakreditasi	UNIT	7
		Jumlah puskesmas perawatan	UNIT	11
4	meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran dan mutu obat serta sumber daya kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan gratis	%	100

II.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa

Dinas kesehatan Kabupaten Gowa yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan. Tugas Dinas Kesehatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi Dinas Kesehatan adalah :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan
3. Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, sarana, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan fungsi tersebut diaplikasikan dalam sejumlah program dan kegiatan yang direncanakan setiap tahunnya, selain itu Dinas Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan serta sejumlah indikator lainnya.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan, hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya serta pencapaian Renstra, maka dapat dirumuskan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi :

1. Masih banyak Program yang belum memberikan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
2. Keterbatasan sarana, prasarana serta SDM yang dimiliki sehingga pelayanan belum optimal.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang menyebabkan tidak semua pasien dapat ditangani sehingga Masih diperlukan adanya penambahan/peningkatan sarana prasarana khususnya alat kesehatan sebagai penunjang prasyarat akreditasi Puskesmas
2. Kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan yang belum memadai berdasarkan permenkes nomor 75.
3. Terbatasnya anggaran dinas kesehatan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN

A. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan

VISI DAN MISI DINAS KESEHATAN KABUPATEN GOWA

Visi

Untuk mencapai sasaran pembangunan kesehatan pada akhir tahun 2021 seperti telah ditetapkan Rencana Pembangunan jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Gowa Tahun 2016-2021. Memperhatikan pada situasi, kondisi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan Kabupaten Gowa maka ditetapkan **Visi Dinas Kesehatan** Kabupaten Gowa Tahun 2016 - 2021 adalah :

“Terwujudnya Gowa Sebagai Kabupaten Sehat”.

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat gambaran kesehatan yang akan diwujudkan yaitu :

1. **Terbentuknya masyarakat yang memiliki lingkungan dan perilaku hidup sehat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan.**
2. **Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya membangun kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.**
3. **Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya secara adil, merata dan proposional.**

Misi

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Gowa, yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pencapaian sasaran Pembangunan Kesehatan Kabupaten Gowa.

Untuk mencapai visi tersebut ditempuh **Misi** sebagai berikut :

1.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola administrasi kantor untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan kenyamanan bekerja.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola administrasi dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dalam bekerja sehingga tercapai penampilan kerja yang baik dan kinerja yang baik pula.

2.Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan

Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan kesehatan sesungguhnya ditentukan oleh peran serta segenap komponen bangsa.

3.Memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Gowa.

Salah satu tanggungjawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas.

Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh Pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

4.Mendorong pemeliharaan dan peningkatan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan upaya – upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang didukung oleh upaya-upaya pengobatan segera dan pemulihan kesehatan.

5. Mendorong kemandirian dan peran aktif masyarakat untuk hidup sehat dengan bertumpu pada potensi daerah.

Kesehatan adalah tanggungjawab bersama dari setiap individu, keluarga dan masyarakat, pemerintah dan swasta.

Upaya Pemerintah untuk terus memperluas cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat untuk hidup sehat.

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN KABUPATEN GOWA

1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah.

Berdasarkan Misi Kesatu RPJMD Kabupaten Gowa yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama, maka dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan, **tujuan yang ingin diwujudkan** adalah :

Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang terwujud melalui upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat serta upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta meningkatkan daya tanggap dan perlindungan masyarakat terhadap resiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.

2. SASARAN

Sasaran menggambarkan hasil yang ingin dicapai melalui tindakan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan Kebijakan umum tersebut, maka **sasaran** yang ingin dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi

2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular

3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan

4. Meningkatnya perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran dan mutu obat serta sumber daya kesehatan.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD

3. STRATEGI

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, yang dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif.

Strategi Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021 yaitu :

“ PENINGKATAN AKSEBILITAS DAN PEMERATAAN KUALITAS LAYANAN KESEHATAN BAGI SEMUA LAPISAN MASYARAKAT BAIK PADA UPAYA YANG BERSIFAT PROMOTIF DAN PREVENTIF MAUPUN PADA UPAYA YANG BERSIFAT KURATIF DAN REHABILITATIF SECARA PROPORSIONAL.”

Berdasarkan Kebijakan Umum tersebut, maka dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, dilaksanakan strategi yang dilakukan pada prioritas program dan kegiatan, yaitu :

Kelompok sasaran strategis pada aspek upaya strategis

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi

Strategi yang dilakukan yaitu :

- Melaksanakan penyuluhan kesehatan, advokasi dan menggalang kemitraan dengan berbagai pelaku pembangunan termasuk daerah.
- Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat.
- Meningkatkan jumlah dan kemampuan tenaga penyuluh kesehatan masyarakat/dan tenaga kesehatan lainnya dalam hal promosi kesehatan.
- Mengembangkan metode promosi kesehatan yang sejalan dengan perubahan dinamis masyarakat.

2. Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesehatan lingkungan

Strategi yang dilakukan yaitu :

- Perluasan cakupan akses masyarakat (skrining cepat bila ada dugaan potensi meningkatnya kejadian penyalit menular seperti malaria).
- Meningkatkan penanggulangan dengan strategi innovative dengan memberikan otoritas pada petugas kesehatan masyarakat.
- Mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pengendalian penyakit melalui community base surveillance berbasis masyarakat untuk melakukan pengamatan terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan masalah kesehatan dan melaporkannya agar dapat dilakukan respon dini sehingga permasalahan kesehatan tidak terjadi.
- Meningkatkan kompetensi nakes.
- Peningkatan peran daerah untuk upaya cegah tangkal penyakit
- Menjamin ketersediaan obat dan vaksin serta alat diagnostic cepat untuk pengendalian penyakit menular secara cepat.
- Melakukan deteksi dini secara proaktif mengunjungi masyarakat
- Mendorong kabupaten memiliki kebijakan PHBS untuk menerapkan kawasan bebas asap rokok.
- Penguatan POKJA Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
- Peningkatan peran Puskesmas dalam pencapaian kecamatan/kabupaten Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) minimal satu Puskesmas memiliki satu Desa SBS.

3. Meningkatnya pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan

Strategi yang dilakukan yaitu :

- Mewujudkan dukungan regulasi yaitu melalui penyusunan kebijakan yang mendukung upaya peningkatan mutu.
- Optimalisasi fungsi FKTP dimana tiap kecamatan memiliki satu puskesmas sesuai dengan standar (terakreditasi).
- Peningkatan puskesmas non perawatan menjadi puskesmas perawatan

- Mewujudkan penguatan mutu advokasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan manajemen Puskesmas
- Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi dan spesifik
- Peningkatan kemampuan SDM
- Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan.

4. Meningkatkan perlindungan finansial, ketersediaan, penyebaran dan mutu obat serta sumber daya kesehatan.

Strategi yang dilakukan yaitu :

- Peningkatan pelayanan kesehatan gratis
- Peningkatan distribusi tenaga yang terintegrasi dan spesifik
- Peningkatan kemampuan SDM
- Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan.
- Meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian dan penggunaan obat rasional melalui penguatan manajerial, regulasi, edukasi serta sistem monitoring dan evaluasi.

Secara rinci rekapitulasi evaluasi Renja Dinas Kesehatan dan Renstra sampai dengan tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 sebagaimana Tabel berikut :

Evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Palembang dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Palembang adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas

Kesehatan

Kabupaten Gowa.

- Evaluasi terhadap pencapaian target

Dari tabel 2.1 dapat diketahui bahwa dalam rangka pencapaian rencana target yang ditetapkan Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2016 dilaksanakan program/kegiatan

sebanyak dua puluh satu program enam puluh tiga kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013 dengan reliasasi pelaksanaan pencapaian kegiatan mencapai 100 % secara rincian realisasi pelaksanaan pencapaian target kegiatan adalah 63 kegiatan mencapai 100 %

- **Evaluasi terhadap kinerja keuangan**

Dalam Tahun Anggaran 2016 Jumlah Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa sebesar Rp. 136.632.587.119,12,-

yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 129.569.507.564,12
- Belanja Modal sebesar Rp. 7.063.079.555,00

Belanja Operasi terdiri dari :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 48.999.015.491,12
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 80.570.492.073,00
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 0,00

Belanja Modal terdiri dari :

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin

sebesar Rp. 2.963.079.555,00

- Belanja Modal Gedung dan Bangunan
sebesar Rp. 4.100.000.000,00

Dari jumlah Anggaran yang tersedia sebesar Rp. 136.632.287.119,12 yang dapat terealisasi sebesar Rp. 129.677.120.004,00 yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp. 123.146.154.994,00
- Belanja Modal sebesar Rp. 6.530.965.010,00

2. Hambatan dan Kendala

Masih terdapat sisa anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran disebabkan karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak habis digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik sebesar Rp. 500,-

- b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Rp. 278.000,00,-
- c. Penilaian angka kredit jabatan fungsional Rp. 5.456.000,-
- d. Pelatihan tata kelola pertanggungjawaban keuangan Rp. 200.000,-
- e. Penyusunan RKA dan DPA SKPD Rp. 270.000,-
- f. Pelayanan kesehatan hari besar keagamaan Rp. 660.000,-
- g. Pertemuan pemahaman standart dan instrument akreditasi Rp. 1.320.000,-
- h. Pendampingan penyusunan dokumen Rp. 500,-
- i. Pemilihan tenaga kesehatan teladan dan penilaian puskesmas berprestasi Rp. 970.000,-
- j. Pelatihan petugas UKS puskesmas Rp. 5.250.000,-
- k. Pengadaan papan bicara tentang bahaya rokok Rp. 256,-
- l. Akreditasi puskesmas 132.400,-
- m. Penyusunan Ranperda kawasan tanpa rokok Rp. 14.400,-
- n. Sosialisasi pentingnya 1000 hari pertama kehidupan lintas sector dan lintas program Rp.220.000,-
- o. Pengadaan logistic Rp. 2.220.400,-
- p. Pengamatan dan pelacakan penyakit berpotensi KLB Rp. 9.300.000,-
- q. Bimbingan teknik surveilans Rp. 4.550.000,-
- r. Survei akreditasi puskesmas Rp. 191.924.150,-
- s. Pengadaan obat generik Rp. 146.012.502,-
- t. Program pelayanan kesehatan gratis 5 Rp. 5.599.903.200,-
- u. Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas Rp. 15.397.604,-
- v. 22) Pendampingan operasional JKN Rp. 5.580.000,-
- w. Biaya operasional kesehatan (BOK) puskesmas Rp. 1.385.848.619,-
- x. Pengawasan kualitas air minum Rp. 27.500.000,-
- y. Pencegahan penularan penyakit endemic/epidemic Rp. 39.600.000,-
- z. Pembangunan puskesmas Rp. 19.020.000,-
- aa. Pelayanan jaminan persalinan Rp. 1.151.082.225,-

bb. Pengadaan sarana instalasi farmasi Rp. 428.376.541,-

cc. Biaya Umum pendampingan DAK Rp. 15.433.000,-

Adapun hal tersebut disebabkan karena :

- a. Untuk kegiatan 1 s/14, 22, 24 dan 29 terdapat sisa dana karena digunakan sesuai dengan kebutuhan namun secara fisik terealisasi 100 %
- b. Untuk kegiatan 15,21 dan 26 terdapat sisa dana yang merupakan sisa tender
- c. Untuk kegiatan 16 dan 17 digunakan sesuai dengan KLB yang terjadi sehingga secara fisik kegiatan terealisasi 100 %
- d. Untuk kegiatan 18,19 dan 28 tidak terealisasi karena dana DAK tidak tersedia.
- e. Untuk kegiatan 20 tidak terealisasi karena dana tidak dapat diproses/dicairkan diakibatkan transfer dari propinsi masuk tanggal 31 Desember 2016.
- e. Untuk kegiatan 23 tidak terealisasi karena dana transfer untuk triwulan IV tidak tersedia.
- g. Untuk kegiatan (25) tidak terealisasi karena adanya kesalahan nomor rekening dari pihak ketiga.
- h. Untuk kegiatan (27) tidak terealisasi karena ada perubahan juknis dari pusat.

B. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

✓ Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - 2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - 2.3. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
4. Bidang Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
5. Bidang Bina Kesehatan Keluarga

6. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Tugas pokok dan fungsi

Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Kesehatan mempunyai fungsi:

1. Pembinaan umum: peningkatan (promotif), pencegahan (preventif), pengobatan (kuratif), dan pemeliharaan (rehabilitatif)
2. Pembinaan teknis, upaya kesehatan dasar dan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
3. Pembinaan operasional berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, **sekretaris mempunyai fungsi** :

1. Penyusunan kebijakan teknis administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, perencanaan pelaporan
2. Penyelenggaraan ketatausahaan, meliputi urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, hubungan masyarakat
3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan

4. Penyusunan program yang meliputi penyusunan program dan anggaran
5. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan sub bagian
6. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan sub bagian

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan administrasi umum kepegawaian.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian umum dan kepegawaian
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian umum dan kepegawaian

2. Sub bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugas : merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas perencanaan dan pelaporan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian perencanaan dan pelaporan
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian perencanaan dan pelaporan

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian perencanaan dan pelaporan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian perencanaan dan pelaporan

3. Sub bagian Keuangan

Tugas : merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa/mengecek, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis sub bagian keuangan
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan sub bagian keuangan
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian keuangan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup sub bagian keuangan

B. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

Bidang bina pelayanan kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas di Bidang Bina Pelayanan Kesehatan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut **Bidang Bina Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi :**

1. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
2. Penyelenggaraan upaya kesehatan dasar termasuk kesehatan komunitas
3. Penyelenggaraan upaya kesehatan khusus meliputi kesehatan jiwa, kesehatan mata, kesehatan kerja, kesehatan haji, kesehatan gigi dan mulut

4. Pembinaan, pengkoordinasian, penegendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Pelayanan Kesehatan
5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Pelayanan Kesehatan

Bidang Bina Pelayanan Kesehatan terdiri dari:

1. Seksi Puskesmas

Tugas :

- a. Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan tentang puskesmas
- b. Melaksanakan perencanaan dan mengawasi pelaksanaan manajemen di puskesmas dan jaringannya
- c. Melaksanakan bimbingan dan mengawasi pelaksanaan manajemen di puskesmas dan jaringannya
- d. Melaksanakan pembinaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya
- e. Melaksanakan pembinaan puskesmas, pustu dan polindes dalam rangka pengadaan alat kesehatan dan pencapaian target sesuai rencana program
- f. Melaksanakan pemantauan, pembinaan, pengawasan ketersediaan dan kecukupan peralatan kesehatan, obat-obatan, vaksin dan bahan reagensia di puskesmas dan jaringannya
- g. Penyelenggarakan pemilihan puskesmas dan puskesmas pembantu
- h. Mengadakan penilaian kegiatan pelayanan puskesmas dan puskesmas pembantu
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya
- j. Mengevaluasi pelaksanaan program dan membuat laporan hasil pelaksanaan tugas

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi puskesmas
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi puskesmas
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi puskesmas
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi puskesmas

2. Seksi Pembinaan Rumah Sakit

Tugas :

- a. Merencanakan pengadaan dan pengelolaan obat-obatan, vaksin, reagens, makanan dan minuman, kosmetik dan perbekalan kesehatan
- b. Melaksanakan perizinan pada pelayanan umum kesehatan, pengusaha obat, makanan dan minuman serta industri rumah tangga
- c. Mendata dan menginventarisasi jumlah dan jenis sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit
- d. Mengumpulkan, menganalisis dan melaporkan data sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan pengawasan serta pengendalian terhadap sarana dan prasarana kesehatan di rumah sakit
- f. Melaksanakan koordinasi usaha-usaha untuk meningkatkan fasilitas sarana kesehatan lingkungan pada tempat-tempat produksi/pengelolaan obat-obatan
- g. Menyediakan bahan pelatihan untuk menunjang peningkatan mutu pelayanan di RS/RB pemerintah dan swasta

- h. Meningkatkan kemampuan petugas dibidang pelayanan kesehatan rumah sakit
- i. Mengadakan pengawasan kegiatan RS/RB pemerintah dan swasta

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi pembinaan rumah sakit
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi pembinaan rumah sakit
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi pembinaan rumah sakit
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi pembinaan rumah sakit

3. Seksi Kesehatan Khusus

Tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi pelayanan kesehatan khusus
- b. Melaksanakan koordinasi pelayanan pemeriksaan laboratorium
- c. Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan kesehatan khusus serta menganalisa mengevaluasi laporan perkembangan dan pelaksanaannya
- d. Melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa, kesehatan indera, kesehatan kerja, olah raga dan lain-lain pada masyarakat secara terpadu dengan lintas program dan lintas sektoral dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan status derajat kesehatan masyarakat
- e. Melaksanakan kegiatan-kegiatan upaya pemeliharaan, perbaikan dan peningkatan status kesehatan masyarakat sehingga dapat hidup optimal
- f. Melaksanakan advokasi dalam upaya memelihara, mempertahankan kesehatan khusus pada kelompok tertentu

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Kesehatan Khusus
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Kesehatan Khusus
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Kesehatan Khusus
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Kesehatan Khusus

C. Bidang Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Bidang Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas : melaksanakan pengamatan penyakit potensial KLB, penyelidikan, pengendalian dan penanggulangan bila ada kejadian luar biasa, penyehatan lingkungan, penyehatan air, pengawasan kualitas lingkungan, penyehatan kawasan dan sanitasi darurat, sanitasi makanan dan bahan pangan serta pengamatan limbah, pengamatan penyakit terhadap kesehatan matra serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyebarluasan data penyakit serta menyelenggarakan pengendalian wabah dan bencana meliputi kesiapsiagaan, investigasi, tanggap darurat dan pemulihan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, **Bidang Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai fungsi :**

1. Penyusunan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
3. Pengendalian wabah dan bencana
4. Pembinaan, pengkoordinasian, penegendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

5. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

Bidang Bina Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan Penyakit

Tugas :

- a. Menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan tahunan dan lima tahunan upaya pencegahan penyakit menular maupun tidak menular
- b. Melaksanakan upaya pencegahan penyakit menular langsung yang bersumber dari binatang melalui upaya pengendalian faktor risiko
- c. Melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pengawasan mutu, perbekalan kesehatan (obat-obatan, reagensia dan peralatan) dalam rangka upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- d. Menyusun profil penyakit menular dan tidak menular serta faktor risikonya
- e. Melaksanakan monev pelaksanaan upaya pencegahan penyakit ditingkat kabupaten
- f. Melaksanakan upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit menular dan tidak menular
- g. Memberi kekebalan/ eliminasi PD3I
- h. Meningkatkan mutu air bersih, TTU, TP2M, dan TP3
- i. Meningkatkan keterampilan petugas dan pengelola TTU, TP2M, dan TP3
- j. Mengakses sasaran imunisasi

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pencegahan Penyakit
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pencegahan Penyakit

- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pencegahan Penyakit
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pencegahan Penyakit

2. Seksi Pemberantasan Penyakit

Tugas : menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan pengamatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular, kesehatan bina matra, penyelidikan epidemiologi, penanggulangan KLB

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pemberantasan Penyakit
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pemberantasan Penyakit
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pemberantasan Penyakit
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pemberantasan Penyakit

3. Seksi Pengamatan Penyakit/ Surveilans

Tugas : melaksanakan inventarisasi jumlah dan jenis sarana tempat-tempat penjualan dan pengguna pestisida (TP3) sanitasi industri, pemukiman, sarana tempat-tempat umum, sarana air bersih, pengendalian sampah dan air limbah serta menganalisa dan melaporkan data hasil pengamatan pada tempat-tempat tersebut, serta melakukan pengamatan terhadap daerah yang mengalami KLB.

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Pengamatan Penyakit/ Surveilans

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pengamatan Penyakit/ Surveilans
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pengamatan Penyakit/ Surveilans
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Pengamatan Penyakit/ Surveilans

D. Bidang Bina Kesehatan Keluarga

Bidang Bina Kesehatan Keluarga mempunyai tugas : melaksanakan deteksi dini dan tumbuh kembang anak dan upaya kuratif, rehabilitatif dengan pengobatan sederhana dan sistim rujukan serta konseling kesehatan keluarga, bina gizi dan kesehatan usia lanjut.

Untuk melaksanakan tugas tersebut **Bidang Bina Kesehatan Keluarga mempunyai fungsi :**

- 1. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Bina Kesehatan Keluarga
- 2. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Bina Kesehatan Keluarga
- 3. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Kesehatan Keluarga
- 4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Kesehatan Keluarga

Bidang Bina Kesehatan Keluarga terdiri dari :

- 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak

Tugas : melaksanakan upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan keluarga, konseling kepada PUS calon akseptor untuk memilih kontrasepsi yang tepat, deteksi dini tumbuh kembang anak, serta mengadakan pelatihan dan pembinaan teknis konseling keluarga bagi petugas pada unit-unit pelayanan.

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Kesehatan Ibu dan Anak
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Kesehatan Ibu dan Anak
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Kesehatan Ibu dan Anak
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Kesehatan Ibu dan Anak

2. Seksi Bina Gizi

Tugas : melaksanakan pelayanan gizi masyarakat, pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi), penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A (KVA) dan kekurangan zat gizi mikro lainnya.

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Bina Gizi
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Bina Gizi
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Bina Gizi
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Bina Gizi

3. Seksi Kesehatan Usia Lanjut

Tugas : melaksanakan upaya pemeriksaan usia lanjut, baik di rumah sakit maupun puskesmas serta pengembangan dan pembinaan upaya kesehatan usia lanjut.

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi kesehatan usia lanjut

- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi kesehatan usia lanjut
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi kesehatan usia lanjut
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi kesehatan usia lanjut

E. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan

Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyebaran informasi kesehatan, mengembangkan metode dan teknis promosi kesehatan dan upaya kesehatan institusi, kegiatan bina peran serta masyarakat dalam rangka mempercepat tumbuhnya gerakan perilaku hidup bersih dan sehat, pembinaan terhadap badan penyelenggara JPKM.

Untuk melaksanakan tugasnya **Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan mempunyai fungsi :**

1. Penyusunan kebijakan teknis Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan
2. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan
3. Pembinaan, Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan
4. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan.

Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan terdiri dari:

1. Seksi Promosi dan Peran Serta Masyarakat

Tugas : melaksanakan promosi kesehatan serta strategi penyebaran informasi kesehatan, pembinaan upaya

kesehatan institusi, badan penyelenggara JPKM, kegiatan bina peran serta masyarakat dalam rangka mempercepat tumbuhnya gerakan perilaku hidup bersih dan sehat.

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Promosi dan Peran Serta Masyarakat
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Promosi dan Peran Serta Masyarakat
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Promosi dan Peran Serta Masyarakat
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Promosi dan Peran Serta Masyarakat

2. Seksi Kesehatan Lingkungan

Tugas : melaksanakan inspeksi sanitasi terhadap mutu sarana air bersih/ air minum, pengawasan kualitas lingkungan, upaya pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan melalui penerapan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan, melaksanakan upaya pengembangan wilayah sehat.

Fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan seksi Kesehatan Lingkungan
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Kesehatan Lingkungan
- c. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Kesehatan Lingkungan
- d. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Kesehatan Lingkungan.

3. Seksi Sarana dan Metode

Tugas : melaksanakan pengembangan metode dan teknis promosi kesehatan dan upaya kesehatan institusi

Fungsi :

- e. Penyusunan program dan kegiatan seksi Sarana dan Metode
- f. Pelaksanaan program dan kegiatan seksi Sarana dan Metode
- g. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Sarana dan Metode
- h. Pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pejabat non struktural dalam lingkup seksi Sarana dan Metode

BAB IV

P E N U T U P

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Dinas Kesehatan serta jaringannya yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis SKPD Dinas Kesehatan Tahun 2011-2015.

Rencana kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017 memuat program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada tahun 2017. Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Seluruh unsur pada Dinas Kesehatan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan yang diamanatkan dalam renja ini dengan sebaik-baiknya.
2. Untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan, pimpinan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan untuk dijadikan bahan masukan pada perencanaan tahun berikutnya.

Dengan adanya Renja Dinas Kesehatan Tahun 2017, prioritas pembangunan bidang pelayanan kesehatan akan lebih terkoordinasi dan tersinergi dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sungguminasa, Desember 2016

KEPALA DINAS KESEHATAN,

dr. H. HASANUDDIN

NIP : 19611127 199603 1001

